

ANALISIS KEBIJAKAN *ECONOMIC and TRADE AGREEMENT* AMERIKA SERIKAT DENGAN TIONGKOK TAHUN 2020

Ni Made Winda Pratiwi Erawan¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, A.A Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1 2 3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email : windaerawann@gmail.com ¹⁾, penny.tjokrodihardjo@gmail.com ²⁾,
aabasuwinu@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to describe the reasons for the US Government to formulate the Economic and Trade Agreement with China, through the causality explanation method. Huawei's theft of trade secret information against T-Mobile has sparked tensions between the US and Chinese governments. T – Mobile responded to the action by reporting Huawei to the Western District Court. This action led to an escalation of conflict between the two countries. Then, President Trump changed the direction of his policy by involving Huawei in the deal even though Huawei was considered a threat to its national interests. Therefore, this research uses the framework of Intellectual Property Rights and the National Interest to answer the reasons behind the US changing policy direction and making agreements regarding China's intellectual property law regulations. This study finds that it is in the national interest of the US to protect the 'level playing field' of domestic firms and US workers.

Keywords : Economic and Trade Agreement, Intellectual Property Rights, T – Mobile USA, Huawei Technologies

1. PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan negara yang telah lama memiliki kecurigaan terhadap Tiongkok sebagai negara di kawasan Asia yang menjadi satu – satunya penentu reputasinya dalam panggung politik internasional. Selain itu, kekhawatiran AS juga didasarkan atas ambisi pemerintah Tiongkok untuk melampaui AS sebagai negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan teknologi. Untuk mencapai tujuannya dan melampaui Amerika Serikat, Tiongkok menyadari bahwa mereka perlu selangkah lebih maju dengan membuat lompatan dalam teknologi yang lebih mutakhir. Namun, faktanya, untuk mencapai ambisi tersebut, Tiongkok melakukan upaya spionase

pada kekayaan intelektual Amerika Serikat, dan kemudian menggunakannya untuk bersaing dengan perusahaan – perusahaan Amerika Serikat.

Kekayaan intelektual sangat penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena persaingan pada industri teknologi informasi saat ini bergerak melampaui persaingan atas inovasi itu sendiri. Sehingga, inovasi merupakan isu yang mendapat perhatian bagi para pemimpin negara, terutama di negara maju. Perlindungan pada inovasi tersebut pada akhirnya merujuk pada perlindungan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Perlindungan atas HAKI ini menjadi penting karena adanya persaingan dalam ruang lingkup ekonomi yang menjadikan suatu negara berlomba untuk saling memengaruhi dan mendominasi. Mengingat dominannya kontribusi kekayaan intelektual bagi suatu negara, dalam implementasinya masih banyak terjadi pelanggaran, jenis kekayaan intelektual yang sering dilanggar yaitu berkaitan dengan informasi rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang digunakan dalam mengoperasikan suatu bisnis yang sifatnya rahasia dan memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui secara umum (Spinello dan Tavani, 2005). Melindungi rahasia dagang perusahaan merupakan kewajiban bagi suatu negara. Hal ini menjadi penting karena beberapa negara yang terdampak dari adanya indikasi pencurian rahasia dagang khawatir akan kontrol pribadi atas suatu perusahaan yang dapat mengarah pada perilaku anti – competitive (Balaam dan Dilman, 2014).

Mengingat sulitnya penegakan hukum rahasia dagang pada tingkat internasional, upaya spionase menggunakan cara ini telah menjadi industri yang berkembang, dampak dari adanya industri tersebut terjadi di AS yang dilakukan oleh Huawei Technologies terhadap T – Mobile USA. Bentuk tindakan pelanggaran berupa pencurian informasi rahasia dagang milik ‘Tappy’ dengan berusaha

mengetahui kode sumber, data pengukuran lengan mekanik, mengambil foto tanpa izin dan mengumpulkan informasi teknis tentang robot tersebut dengan tujuan untuk membuat pengembangan xDeviceRobot milik Huawei.

Pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Huawei China dan Huawei USA terhadap T – Mobile USA Inc menjadi perhatian serius karena Huawei merupakan salah satu perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dengan Pemerintah Tiongkok. Hal ini membuat presiden Trump membuat kebijakan mengenai kenaikan tarif terhadap Tiongkok pada tahun 2018, adanya kenaikan tarif tersebut menimbulkan ketidakstabilan politik antara AS dengan Tiongkok. Pada Mei 2019, AS mengenakan tarif tinggi terhadap Tiongkok, tarif ini bertujuan untuk memaksa Tiongkok membuat kesepakatan yang menguntungkan dengan AS. Untuk meredakan ketidakstabilan dan perang tarif antara keduanya, USTR merumuskan kebijakan *Economic and Trade Agreement* dengan menitikberatkan pada sistem penyelesaian sengketa dengan memastikan implementasi dan penegakan yang efektif.

Perjanjian ini mencakup kesadaran AS dan Tiongkok terkait dengan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terutama pada rahasia dagang saat suatu negara berubah dari konsumen pada produk kekayaan

intelektual menjadi produsen utama produk kekayaan intelektual. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti ketika sebagai negara adidaya, AS memiliki kesempatan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok terkait dengan pencurian rahasia dagang. Namun pada masa pemerintahan Trump, keadaan tersebut berbanding terbalik dengan memilih untuk membuat kesepakatan dengan Tiongkok.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan tiga literatur sebagai kajian Pustaka untuk memahami topik penelitian dan menemukan kebaharuan. Literatur pertama yaitu tulisan Debora Halbert (2016) yang berjudul *Intellectual Property Theft and National Security : Agendas and Assumptions*. Helbert (2016) menjelaskan mengenai upaya suatu negara untuk menetapkan pencurian kekayaan intelektual sebagai masalah keamanan nasional, yang secara tidak langsung mengancam stabilitas negara dalam sistem politik internasional. Oleh karena itu, Helbert (2016) menggabungkan penerapan konsep kekayaan intelektual sebagai masalah keamanan nasional dan menggunakan hal tersebut untuk membenarkan perlindungan pada ancaman peretasan dan pencurian rahasia dagang.

Karya Helbert (2016) membantu Peneliti untuk melihat peran pemerintah dalam membingkai penerapan konsep

kekayaan intelektual sebagai masalah keamanan nasional, dan pemerintah berhak untuk merumuskan suatu kebijakan yang mampu melindungi keamanan domestic negaranya. Peneliti melihat sisi yang tertinggal, yang mana penelitian ini berfokus kepada respon AS terhadap pencurian rahasia dagang oleh Tiongkok dengan memperbaiki hubungan bilateral melalui perjanjian perdagangan dari sudut pandang Neo – realisme.

Literatur kedua, karya Katarina Radonjic (2012) yang berjudul *The Nature of The Relationship between American Multinational Corporations and Chinese Bussinesses and Its Effect on the Problem of Intellectual Property Law*. Radonjic (2012) menyatakan bahwa isu mengenai kekayaan intelektual merupakan salah satu dari dampak perkembangan globalisasi, sehingga HAKI secara tidak langsung dapat memengaruhi hubungan dalam bidang ekonomi dan politik antar negara. Karya Radonjic (2012) membantu peneliti untuk melihat perbedaan penerapan hukum HAKI di AS dan Tiongkok, perbedaan ini memengaruhi proses perumusan kesepakatan perdagangan diantara keduanya, yang mana ketidakjelasan hukum di Tiongkok dapat mengancam inovasi perusahaan serta menjadi ancaman bagi AS.

Literatur ketiga, karya Natalia Wyzycka dan Reza Hasmath (2017) berjudul *The Impact of the European Unions's Policy Towards China's*

Intellectual Property Regime. Tiongkok dan Uni Eropa memiliki kepentingan yang saling melengkapi, namun memiliki tindakan yang berbeda dalam perlindungan HAKI. Uni Eropa sebagai negara maju telah melakukan usaha secara progresif untuk membangun kerja sama dengan Tiongkok dalam bidang kekayaan intelektual melalui program bantuan teknis. Bantuan ini membawa beberapa norma serta standar khusus Uni Eropa tentang kekayaan intelektual, dan imbalan secara finansial yang dikombinasikan dengan ancaman sanksi ekonomi. Wyzycka & Hasmath (2017) dalam tulisannya mengatakan bahwa hal ini memberikan dampak yang signifikan untuk menyadarkan Tiongkok, sehingga Penelitian ini dapat membantu untuk melihat bukti kesuksesan Uni Eropa dalam membina hubungan dagang dengan Tiongkok melalui bantuan teknis yang diberikan sesuai dengan standar norma HAKI negaranya. Namun, karya Wyzycka & Hasmath (2017) memiliki perbedaan dengan karya peneliti, yang mana karya ini membahas alasan AS untuk menegakkan perlindungan HAKI di Tiongkok dengan melakukan kesepakatan perdagangan fase satu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksplanative kausalitas, yangmana akan menggambarkan efek kausal dari pelanggaran kekayaan intelektual pada pencurian rahasia dagang yang dilakukan oleh Huawei kepada T – Mobile, dan mekanisme

kausal yang berupaya dijelaskan yaitu upaya AS melalui perumusan kesepakatan untuk melindungi produk kekayaan intelektual perusahaan domestiknya.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, seperti buku elektronik, media online, yangnantinya menjelaskan alasan AS merumuskan *Economic and Trade Agreement* kepada Tiongkok terkait dengan pelanggaran rahasia dagang. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu antar negara, dengan teknik kepustakaan pada teknik pengumpulan data serta menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan pada teknik analisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dinamika Kerja Sama AS Dengan Tiongkok Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teknologi dan inovasi merupakan faktor penting dalam mempertahankan daya saing AS pada rantai perekonomian global. Jika sebuah teknologi bernilai baru, maka kemungkinan untuk ditiru atau disalin oleh pihak lain akan semakin besar, hal ini mengurangi potensi keuntungan dari penemu asli serta menghilangkan insentif untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat inovatif. Oleh karena itu, sebagai negara adidaya, AS memiliki sistem hukum yang berkaitan dengan HAKI yang relative kuat, kuatnya sistem ini bertujuan untuk mendorong kegiatan

inventif dan kreatif yang dipandang sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Falvey, R & Foster, N 2006).

Namun, sistem HAKI yang kuat di AS tidak sebanding dengan di Tiongkok. Usaha Tiongkok untuk mengambil rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan AS sudah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Upaya yang dilakukan oleh Tiongkok ini bertujuan untuk kebijakan pada industri Tiongkok yaitu melakukan 'reformasi ekonomi' dengan menyempurnakan pengelolaan ekonomi oleh Pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis untuk memperkuat beberapa sektor, khususnya perusahaan milik negara (USTR, 2020). Oleh karena itu, saat ini, kebijakan dan praktik perdagangan Tiongkok menimbulkan kekhawatiran khususnya AS. Presiden Trump mengambil tindakan untuk mengatasi kebijakan dan praktik Tiongkok yang merugikan inovasi AS, serta berkomitmen untuk mengakhiri pencurian yang berkaitan dengan kemakmuran industri AS dan menciptakan kondisi perdagangan dengan pola permainan yang adil bagi para pekerja untuk melindungi daya saing Amerika (Trump White House, 2018).

Tiongkok berusaha menyaingi AS dengan berulang kali menunjukkan bahwa Tiongkok dapat memperoleh teknologi dan membangun saingan yang kompetitif bagi perusahaan – perusahaan AS, seperti memperoleh

teknologi dari perusahaan yang berbasis di wilayah AS bagian barat. Pada Agustus 2018, Pemerintah Trump melakukan penyelidikan terhadap tindakan, kebijakan dan praktik Tiongkok terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dan inovasi berdasarkan *Section 301* dari *Trade Act of 1974*, hasil dari penyelidikan ini yaitu Tiongkok menggunakan pembatasan kepemilikan asing seperti persyaratan usaha patungan untuk memaksa atau menekan perusahaan AS melakukan transfer teknologi ke entitas Tiongkok. Tiongkok juga melakukan dan mendukung intrusi dunia maya ke perusahaan – perusahaan Amerika Serikat untuk mengakses informasi yang bernilai komersial yang dianggap sensitive, seperti rahasia dagang (Trump White House, 2018).

Mengingat adanya nilai komersial dari informasi rahasia dagang, pemerintah AS mengupayakan perlindungan akan hal tersebut dengan menaikkan tarif atas import terhadap Tiongkok sebesar USD\$50 Milliar sebagai tanggapan atas pencurian teknologi dan kekayaan intelektual sejak Maret 2018 (Council on Foreign Relations, 2021). Pengenaan tarif pada barang – barang Tiongkok bertujuan untuk melindungi para pekerja Amerika Serikat dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok dengan menghukum upaya Partai Komunis Tiongkok untuk melakukan pencurian dan mengambil untung dari inovasi dan kekayaan intelektual Amerika Serikat.

Perusahaan yang menjadi fokus utama *The U.S Commerce Department* yaitu Huawei Technologies Co. Ltd. Ketakutan mendasar yang berkaitan dengan ancaman tersebut yaitu ketidakmampuan Huawei untuk secara kredibel mengklaim bahwa perusahaannya tidak bekerja sama dengan negara – partai Tiongkok (Williams, R 2021). Selama menjalin kerja sama atau melakukan kegiatan operasional dengan perusahaan – perusahaan Amerika Serikat, Huawei Technologies Co. Ltd sudah beberapa kali melakukan kegiatan spionase. Salah satu perusahaan yang berhasil mengajukan gugatan ke pengadilan Distrik Barat Washington yaitu T – Mobile USA Inc. atas praktik pencurian rahasia dagang.

Tindakan pelanggaran tersebut menciptakan suatu kondisi yang tidak adil untuk persaingan dan kerja sama suatu bisnis dan merupakan ancaman bagi ekonomi nasional Amerika Serikat. Selama menjalin kerja sama atau melakukan kegiatan operasional dengan perusahaan – perusahaan Amerika Serikat, Huawei Technologies Co. Ltd sudah beberapa kali melakukan kegiatan spionase, seperti menandatangani perjanjian kerahasiaan dan kemudian melanggar perjanjian tersebut, atau dengan melibatkan karyawan atau insinyur Huawei untuk mengambil informasi rahasia yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual perusahaan T - Mobile.

Tindakan pelanggaran tersebut menciptakan suatu kondisi yang tidak adil untuk persaingan dan kerja sama suatu bisnis dan merupakan ancaman bagi ekonomi nasional Amerika Serikat. karena persaingan yang adil dalam era teknologi sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian suatu negara. Dengan adanya pengenaan tariff yang dilakukan Trump, Ia yakin bahwa pengenaan biaya yang tinggi atas tariff tersebut akan memaksa Tiongkok untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama pada perekonomian Amerika Serikat yang telah lama mengalami kerugian akibat upaya spionase yang dilakukan oleh Huawei Technologies Co. Ltd. Pengenaan tariff dilakukan sebagai bentuk perlindungan atas informasi rahasia dagang agar Tiongkok melakukan reformasi pada kebijakan yang berkaitan dengan informasi rahasia dagang di negaranya.

4.1.1 Keterkaitan Huawei Technologies dengan T – Mobile USA Inc

Huawei Technologies Co. Ltd merupakan perusahaan produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, Huawei bekerja sama dengan berbagai perusahaan operator nirkabel, salah satunya yaitu T – Mobile USA Inc. T – Mobile adalah salah satu penyedia layanan nirkabel terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, T – Mobile mulai mengembangkan system

pengujian telepon seluler secara otomatis dengan menggunakan robot yang diberi nama 'Tappy'. Semenjak robot tersebut dibuat oleh T – Mobile, perusahaan ini menganggap Tappy sebagai bagian dari informasi rahasia dagang yang sifatnya rahasia dan memiliki nilai kekayaan intelektual.

Pada tahun 2010, Futurewei Technologies Inc. (Huawei Technologies USA) yang merupakan bagian dari perusahaan Huawei USA Inc. menandatangani perjanjian terkait dengan pendistribusian telepon nirkabel ke T – Mobile. Melalui perjanjian tersebut, Huawei USA mengakui bahwa nantinya, mereka akan mendapatkan informasi rahasia dari T – Mobile sebagai bagian dari hubungan bisnis yang dilakukan diantara keduanya, termasuk rahasia dagang, kekayaan intelektual dan informasi teknis (United States District Court, 2021). Dalam perjanjian tersebut, Huawei USA berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia tersebut yang tetap menjadi milik T – Mobile secara eksklusif dan tidak akan menggunakan rahasia tersebut untuk keperluan komersial perusahaannya.

Hal ini juga menjadi poin utama dari adanya kerja sama diantara kedua belah pihak yaitu Huawei tidak memiliki pangsa pasar telepon nirkabel di Amerika Serikat, sehingga Huawei bekerja sama dengan T – Mobile untuk menyesuaikan standar telepon seluler nirkabel di Amerika Serikat, yang mana

Amerika Serikat merupakan pasar telepon nirkabel terbesar ketiga di dunia (United States District Court, 2021). Sehingga hal ini menjadi suatu momentum bagi Huawei Technologies Co. Ltd dalam mendapatkan pijakan di pasar Amerika Serikat.

Agustus 2012, T – Mobile memberikan akses kepada insinyur Huawei USA ke sistem pengujian robot Tappy. Pada tahun yang sama, dengan memanfaatkan akses yang diperbolehkan T – Mobile kepada Huawei USA, Huawei China mulai memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengembangkan robot untuk menguji ponselnya secara mandiri, robot tersebut dikenal dengan nama xDeviceRobot. Usaha Huawei untuk mengetahui informasi rahasia dagang milik Tappy dikemas dengan skema sangat hati – hati. Hal ini dilatarbelakangi oleh Huawei China dan Huawei USA sangat menghargai T – Mobile sebagai pihak yang bekerja sama dengan perusahaannya karena T – Mobile merupakan perusahaan pertama yang bekerja sama dengan Huawei di pasar telepon nirkabel Amerika Serikat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan bisnisnya.

4.1.2 Kebijakan Informasi Rahasia Dagang di Amerika Serikat dan Tiongkok

AS sudah memiliki undang – undang yang berkaitan dengan informasi rahasia dagang dibawah *The Economic*

Espionage Act of 1996. Undang – undang tersebut diamandemen menjadi *The Defend Trade Secrets Act of 2016*, yang mana tindakan spionase ekonomi mencakup tindakan perdata swasta atas penyalahgunaan rahasia dagang, sehingga memberikan pemilik rahasia dagang skema yang adil untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki dalam ruang lingkup domestik AS (USPTO, 2020). Para pihak yang menjadi korban akan tindakan tersebut dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dimana kasus tersebut terjadi.

Hal ini berbanding terbalik dengan Tiongkok, rahasia dagang merupakan konsep yang relative baru di Tiongkok, sehingga penyalahgunaan rahasia dagang lebih banyak terjadi di negara ini. Tiongkok telah memiliki kerangka hukum dan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang yang berada dibawah payung besar undang – undang dan interpretasi peradilan Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya, apabila terjadi pelanggaran, pemilik rahasa dagang, terutama perusahaan asing, lebih sulit untuk menegakkan haknya. Hal ini disebabkan pengaruh politik, proteksionisme local dan perusahaan milik negara yang masih sulit untuk beradaptasi mengenai inovasi rahasia dagang yang memiliki nilai komersial (EU China IPR, 2011).

Pembuktian pelanggaran rahasia dagang dalam implementasinya, pengumpulan dan pengakuan bukti lebih sulit dibuktikan dibandingkan dengan apabila pemilik rahasia dagang melaporkan tindakan pencurian tersebut di negara maju

(EU China IPR, 2011). Hal ini karena perbedaan mekanisme pengadilan, yang mana Tiongkok umumnya mengandalkan bukti dokumenter. Kesaksian saksi, termasuk pendapat ahli, tidak menjadi perhatian serius dan memiliki nilai pembuktian yang kecil (EU China IPR, 2011).

4.1.3 Perumusan Economic and Trade Agreement oleh Amerika Serikat

Setelah beberapa kali proses negosiasi berusaha dilakukan oleh kedua negara mengalami kegagalan, pada 15 Mei 2019, AS menambahkan Huawei sebagai perusahaan '*entity list*' yang secara efektif melarang perusahaan AS melakukan transaksi ke perusahaan Huawei tanpa persetujuan pemerintah AS dan menaikkan tarif barang – barang Tiongkok senilai US\$200 Milliar dari 10 persen menjadi 25 persen (Mullen, A 2021). Kemudian hal ini mendapat tanggapan dari pemerintah Tiongkok, Tiongkok menaikkan tarif produk AS senilai USD\$60 Milliar yang merupakan tanggapan dari proteksionisme perdagangan (Mullen, A 2021).

Pemerintah AS melalui USTR berusaha untuk menurunkan tensi dengan Tiongkok, pada 29 Juni 2019, Trump menyetujui gencatan senjata perang dagang KTT G – 2- dengan mengatakan bahwa hasil negosiasi dengan Tiongkok dinilai lebih baik, yang mana AS tidak akan mengenakan tarif lebih lanjut pada Tiongkok. Pada tanggal 11 Oktober 2019, Trump mengatakan bahwa para negosiatornya telah mencapai

'kesepakatan fase satu' yang akan menunda penerapan lebih banyak tarif pada impor Tiongkok. Perjanjian perdagangan fase satu berhasil ditanda tangani pada 15 Januari 2020 bertujuan untuk menyelesaikan pandangan yang berbeda terkait dengan perdagangan Amerika Serikat terhadap praktik perdagangan Tiongkok, termasuk dalam hal perlindungan rahasia dagang dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual.

4.2 Keterkaitan Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Perjanjian Economic and Trade Agreement

4.2.1 Upaya Amerika Serikat dalam Melindungi Rahasia Dagang

HAKI adalah kunci dari komponen struktur ide, teknologi informasi dan kekayaan intelektual, sehingga perlindungan yang berkaitan pada Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang penting ditengah perkembangan globalisasi bagi suatu negara, terutama Amerika Serikat. Ketidakcakapan dalam perlindungan dan penegakkan rahasia dagang di Tiongkok telah menjadi permasalahan utama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Amerika Serikat, mendorong pertumbuhan industri – industri baru dan menyediakan sumber kekuatan bagi ekonomi negaranya dalam perlindungan informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh suatu perusahaan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh negara.

Salah satu prioritas utama untuk administrasi Trump adalah memberikan perlindungan dan penegakkan Hak Kekayaan Intelektual Amerika Serikat yang memadai dan efektif. Tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa pemilik kekayaan intelektual yang berada didalam ruang lingkup Amerika Serikat memiliki kesempatan penuh dan adil untuk menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka ciptakan (USTR, 2017). USTR menyebut Tiongkok sebagai rumah bagi aktivitas pelanggaran intelektual, terutama pencurian informasi rahasia dagang karena Huawei telah dengan sadar mencuri dan melanggar perjanjian pengungkapan rahasia dagang milik T – Mobile, dan dalam hal ini T – Mobile memenangkan putusan pengadilan terhadap Huawei atas upaya pencurian informasi rahasia dagang yang melibatkan karyawan dan insinyur Huawei, serta menemukan bahwa Huawei menyalahgunakan rahasia dagang T – Mobile.

Hal ini sejalan dengan analogi Waltz (1979 : 134), ia mengatakan bahwa negara harus merespon terhadap tindakan yang dianggap mengancam dengan tindakan yang dapat merubah bentuk dari ancaman tersebut. Walaupun hasilnya tidak pasti, karena tidak adanya kedudukan tertinggi dalam sistem internasional, namun dalam hal ini keadaan atau aktor mampu memberikan pengaruh antara satu dengan yang lainnya, maka keuntungan relatif dapat memiliki peran yang lebih unggul. Yangmana, negara berusaha untuk

memaksimalkan pengembalian yang diharapkan, dan negara berusaha untuk mengamankan kelangsungan hidup yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

Keuntungan relative yang Peneliti tekankan dalam hal ini yaitu ketika suatu kondisi sistem politik internasional yang tidak dapat diprediksi, seperti bagaimana Tiongkok berusaha untuk mengungguli AS dalam bidang teknologi untuk kepentingan nasional negaranya, oleh karena itu AS berusaha untuk menurunkan tensi politik yang berkaitan dengan perdagangan ekonomi dengan merumuskan suatu perjanjian fase satu dengan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Tiongkok dalam beberapa tahun kedepan. Tujuan dari adanya pendekatan tersebut yaitu mampu menyeimbangkan kedudukan Tiongkok sebagai negara didunia ketiga yang ingin bersaing untuk mengungguli AS dalam bidang teknologi menjadi negara hegemon. Hal ini diperjuangkan oleh Amerika Serikat karena dalam panggung ekonomi politik dunia, AS memperoleh status hegemoniknya dari sumber daya material yang lebih besar, yaitu memiliki kontrol atas pasar, bahan mentah, sumber modal dan keunggulan kompetitif dalam produksi barang – barang yang bernilai tinggi (Keohane, 1984).

4.2.2 Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat pada Economic and Trade Agreement

Amerika Serikat mempertahankan inovasi yang diciptakan oleh T – Mobile USA Inc. berupa pengujian smartphone secara

otomatis yang dilakukan oleh Tappy dengan memasukan perlindungan informasi rahasia dagang pada Bab I mengenai kekayaan Intelektual dan menempatkannya khusus pada Bagian B mengenai Rahasia Dagang dan Informasi Bisnis Rahasia pada perjanjian perdagangan fase satu dengan Tiongkok. Hal ini dilakukan karena Tappy, yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual milik T – Mobile USA Inc. menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan cara operator nirkabel lain menguji ponselnya. Sistem pengujian yang dilakukan secara otomatis oleh Tappy tersebut mampu meningkatkan angka produktivitas suatu perusahaan dan menempatkan ponsel yang diuji melalui tahapan tersebut sesuai dengan standar Amerika Serikat yang mana standar yang dibuat Amerika Serikat terhadap suatu smartphone nirkabel merupakan standar yang sudah ditetapkan secara internasional.

Selama pemberian akses yang diberikan oleh T – Mobile kepada Huawei untuk Huawei menguji telepon seluler nirkabel sebelum di distribusikan di pasar AS, pihak Huawei China memanfaatkan kondisi tersebut untuk berusaha menduplikasi sistem robot Tappy. Huawei China berusaha untuk merancang sistem pengujian robotnya sendiri yaitu xDeviceRobot. Hal ini didasarkan atas ponsel yang didistribusikan Huawei China ke T – Mobile umumnya tidak sesuai kualitas standar yang sudah ditentukan T – Mobile dan Amerika Serikat. Pencurian rahasia dagang dengan memanfaatkan perusahaan yang bekerja sama dengan Huawei Technologies Co. Ltd dan sumber daya

manusia seperti insinyur dan karyawan perusahaan telah menjadi focus utama pemerintah Amerika Serikat.

Amerika Serikat telah mendesak Tiongkok untuk melakukan amandemen terkait dengan kerangka hukum dan peraturan terkait kekayaan intelektualnya. Desakan tersebut tidak mendapat respon apapun dari Tiongkok. Namun, pada 23 Mei 2019, Trump mengubah tindakannya dan menjadikan Huawei sebagai alat diplomatiknya serta dapat menjadi bagian dari negosiasinya dengan Tiongkok untuk menyelesaikan perang dagang yang sudah berlangsung selama 22 bulan. Hal ini dilakukan karena Tiongkok terus meningkatkan serangan balasan dan memperingatkan perusahaan teknologi AS bahwa mereka dapat terputus sama sekali dari pasar Tiongkok. Selain itu, Amerika Serikat kembali menerima Huawei dan mempertimbangkan sebagai bagian dari perjanjian bilateralnya dengan Tiongkok karena Amerika Serikat berusaha untuk mencari keuntungan strategis seperti Tiongkok akan melakukan pembelian tambahan pada sektor yang substansial atas barang manufaktur, jasa, serta energi Amerika Serikat senilai USD\$200 Milliar selama dua tahun kedepan, serta menyelesaikan beberapa keluhan Amerika Serikat tentang praktik pelanggaran pencurian kekayaan intelektual pada rahasia dagang.

Hal ini menjadi tujuan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan eksternalnya, dimana saat ini, keamanan negara tetap

menjadi tujuan utama disetiap negara. Keamanan negara saat ini relevan dengan kondisi ekonomi suatu negara karena sistem keamanan saat ini berkembang dengan didasarkan atas saling ketergantungan dan kerja sama antara satu negara dengan negara lainnya (Zukrowska, K 2017). Keamanan ekonomi dalam hal ini menjadi bagian dari keamanan non tradisional yang menarik perhatian berbagai aktor. Tujuan dari keamanan ekonomi yaitu perbaikan yang bergantung pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Dent, 2001 : 6 – 7).

Atas dasar hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat berhak membingkai pencurian informasi rahasia dagang yang dilakukan oleh Huawei Technologies Co. Ltd terhadap perusahaan T – Mobile USA Inc sebagai permasalahan yang mengancam keamanan ekonomi negara dengan merumuskan *Economic and Trade Agreement* yang merupakan bagian dari perjanjian perdagangan fase satu nya dengan Tiongkok untuk melindungi kelangsungan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Amerika Serikat dalam jangka panjang dan tetap mempertahankan status hegemoni negaranya. Hal ini didasarkan atas kekuatan relatif dapat dikatakan sebagai pertimbangan bagi AS, tidak hanya mengenai keuntungan, namun juga terkait dengan bagaimana posisi serta kedudukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang memiliki rencana untuk menggantikan

Amerika Serikat sebagai negara adidaya dalam bidang teknologi dengan kondisi yang lebih dominan dari Amerika Serikat. Dengan dirumuskannya *Economic and Trade Agreement* oleh *The United States Trade Representative* (USTR), perjanjian tersebut dapat ditujukan sebagai alat untuk meredam adanya ancaman keamanan nasional dengan membuat kesepakatan yang berkaitan dengan informasi rahasia dagang dan regulasi kebijakan yang sifatnya komprehensif.

4.3 Keterkaitan *Economic and Trade Agreement* dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Politik Global

Rahasia dagang dalam implementasinya tidak perlu secara formal didaftarkan sebagai barang public dari produk kekayaan intelektual, karena sifatnya rahasia. Ketika bentuk rahasia dagang yang merupakan produk dari kekayaan intelektual tersebut mendapatkan perlindungan yang sah dari negara, penduduk Amerika Serikat akan diuntungkan. Hal ini disebabkan karena tanpa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, karya atau inovasi tersebut dapat dengan mudah disalin dan kecil kemungkinan untuk menciptakan karya seni yang serupa.

Percobaan pengambilan keuntungan dilakukan oleh Huawei Technologies Co. Ltd melalui perusahaan afiliasinya yaitu Huawei USA untuk mengambil informasi rahasia dagang yang dimiliki Tappy sebagai langkah untuk menyempurnakan pengembangan

xDeviceRobot milik Huawei menimbulkan kecurigaan Pemerintah Amerika Serikat kepada Tiongkok. Melalui penandatanganan kesepakatan perjanjian ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati kedua negara, Amerika Serikat dan Tiongkok bersepakat untuk menyelesaikan perbedaan hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual diantara kedua negara. Dalam perjanjian ini, Amerika Serikat dan Tiongkok setuju untuk memastikan bahwa perlindungan yang efektif untuk informasi rahasia dagang dan informasi bisnis rahasia yang berhubungan dengan proses, kegiatan operasional, alat untuk produksi, transaksi bisnis atau logistik, atau informasi lain yang bernilai komersial merupakan elemen inti dalam mengoptimalkan lingkungan bisnis, yang mana informasi tersebut harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Melalui perjanjian tersebut juga, kedua pihak berkomitmen untuk memperkuat hukum pidana. Kesepakatan perdagangan tersebut pada akhirnya dapat dikatakan sebagai '*game – changer*' yang menyebabkan Tiongkok meningkatkan rezim penegakan hukumnya terhadap penyalahgunaan rahasia dagang. Amerika Serikat melihat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan yang berkaitan dengan perusahaan dalam negeri untuk mendorong suatu inovasi teknologi dalam negeri. Hal ini karena Pemerintah yang didukung oleh perusahaan swasta memiliki perhatian kepada proses untuk memperlambat difusi internasional teknologi Tiongkok dan tetap

untuk mempertahankan kendali atas teknologi dan pengetahuan tersebut melalui perlindungan informasi rahasia dagang pada kesepakatan perdagangan fase satu tersebut. Keputusan Amerika Serikat untuk melindungi informasi rahasia dagang perusahaan domestiknya, seperti T – Mobile USA Inc merupakan suatu langkah yang tepat untuk meningkatkan kembali inovasi dari para inovator untuk menciptakan suatu produk yang baru dan tetap mempertahankan kedudukan Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan unggul dalam bidang teknologi. Pengetahuan dan teknologi nantinya membentuk basis kekayaan dan kekuasaan yang semakin kritis. Oleh karena itu, dalam perkembangan globalisasi dan digitalisasi yang sedang berlangsung, menjaga rahasia dagang merupakan suatu tantangan yang signifikan bagi para pelaku bisnis.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki perlindungan terhadap kekayaan intelektual termasuk informasi rahasia dagang yang kuat, namun, hal ini berbanding terbalik dengan Tiongkok yang sudah memiliki kebijakan yang berkaitan dengan informasi rahasia dagang, tetapi tidak ada regulasi yang jelas dan sulitnya memberikan bukti apabila terjadi pelanggaran.

Pencurian informasi rahasia dagang yang dilakukan oleh Huawei Technologies Co. Ltd telah menjadi focus utama pada masa pemerintahan Presiden Donald

Trump. Tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran pada melemahnya dominasi Amerika Serikat dalam bidang teknologi, pertumbuhan ekonomi, daya saing dan 45 juta pekerja Amerika Serikat secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada industri intensif yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Presiden Trump bersedia untuk mempertimbangkan beberapa pembatasan yang telah dilakukan kepada Huawei Technologies Co. Ltd dengan melakukan negosiasi bersama dengan pemerintah Tiongkok melalui Economic and Trade Agreement karena perang dagang yang meningkat dapat merusak kondisi perekonomian Amerika Serikat.

Melalui kesepakatan tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan konflik ekonomi diantara kedua negara dengan menyamakan persepsi melalui beberapa perjanjian seperti memperkuat perlindungan dan penegakan hukum di Tiongkok, serta meningkatkan rezim penegakkan hukum Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap penyalahgunaan rahasia dagang, mendapatkan keuntungan strategis seperti menekan Tiongkok untuk melakukan pembelian tambahan terhadap sector substansial selama 2 tahun kedepan, menyelesaikan beberapa keluhan AS tentang pelanggaran informasi rahasia dagang dan menghilangkan tekanan bagi perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok untuk melakukan transfer teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Spinello, A & Tavani, H. (2005). Intellectual Property Rights in a Networked World : Theory and Practice. Information Science Publishing. United States, America
- Balaam, D & Veseth, M. (2014). Introduction to International Political Economy 6th Ed. United States of America: Pearson Education.
- Helbert, D. (2016). Intellectual Property Theft and National Security : Agendas and Assumptions. The Information Society, 32:4, 256-268, DOI: 10.1080/01972243.2016.1177762
- Radonjic, Katarina. 2012. The Nature of the Relationship between American Multinational Corporations and Chinese Businesses and Its Effect on the Problem of Intellectual Property Law. Ottawa University.
- Wyzycka, N., & Hasmath, R. (2017). The Impact of The European Union's Policy Towards China's Intellectual Property Regime. International Political Science Review. Vol 38(5) 549 – 562. Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0192512116641320 journals.sagepub.com/home/ips
- Falvey, R & Foster, N. (2006). The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth : Theory and Evidence. UNIDO Strategic Research and Economics Branch
- USTR. (2020). Rebalancing United States – China Trade. <https://ustr.gov/phase-one> pada tanggal 5 Oktober 2021
- Trump White House. (2018). President Donald J. Trump is Standing Up for American Innovation. Diakses dari <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-standing-american-innovation/> pada Rabu, 16 Februari 2022
- Council on Foreign Relations. (18/03/2021). Timeline US Relations With China. Diakses melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china> pada tanggal 31 Januari 2022
- Williams, R. (2021). Beyond Huawei and TikTok : Untangling U.S Concerns Over Chinese Tech Companies and Digital Security. Diakses dari <https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/b/732/files/2021/04/Robert-Williams-Beyond-Huawei-and-TikTok-Updated.pdf>
- United States District Court. (2019). US Government Publishing. Diakses dari <https://www.geekwire.com/2019/huawei-pleads-not-guilty-federal-charges-stealing-trade-secrets-t-mobile-trial-set-2020/> pada 6 Oktober 2021
- USPTO. (2020). Trade secrets / regulatory data protection. Diakses dari <https://www.uspto.gov/ip-policy/trade-secret-policy> pada Kamis, 24 Maret 2022
- EU CHINA IPR. (2011). Roadmap for Intellectual Property Protection in

- China. Diakses dari <https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/trade-secrets-in-china-en.pdf>
- Mullen, A. (29/08/2021). US-China trade war timeline: key dates and events since July 2018. Diakses melalui <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3146489/us-china-trade-war-timeline-key-dates-and-events-july-2018> pada tanggal 7 Mei 2022
- USTR. (2017). 2017 Special 301 Report. Diakses dari <https://www.iprcenter.gov/file-repository/2017-special-301-report-final.pdf/view> pada 6 Oktober 2021
- Waltz, K. (1979) Theory of International Politics. New York: McGraw Hill.
- Keohane, R. (1984) After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Zukrowska, K. (2017). The Link Between Economics, stability and security in a Transforming Economy. Institute of Development and Strategic Studies. Diakses dari <https://www.nato.int/docu/colloq/1999/pdf/269-283.pdf>
- Dent, C. (2001) 'Singapore's foreign economic policy: the pursuit of economic security', Contemporary Southeast Asia, April, Vol. 23